

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Ulpina (2025) dari Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai mengenai efektivitas pelaksanaan program Posyandu Remaja di Desa Ju'uh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa program telah berjalan namun belum optimal karena masih terdapat kendala pada kapasitas kader, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi remaja dan dukungan keluarga. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa dan pihak puskesmas meningkatkan kapasitas kader melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan dan komprehensif, mencakup pelayanan kesehatan remaja, komunikasi, serta pencatatan administrasi. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas fisik seperti penyediaan tempat duduk yang memadai, ruang tunggu yang nyaman, serta perlengkapan kesehatan yang lengkap untuk menunjang kualitas layanan. Program juga perlu memperkuat strategi edukasi dan penyuluhan dengan pendekatan yang menarik dan sesuai karakteristik remaja, serta melibatkan keluarga guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif. Di sisi lain, dukungan lintas sektor seperti keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, agar program dapat terus

diperbaiki dan dikembangkan, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan remaja secara menyeluruh dan berkelanjutan (Ulpina, 2025).

2. Penelitian Agus Ariana (2025) dari Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai mengenai efektivitas Posyandu Bina Remaja di Desa Kalahiang, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa secara umum pemahaman terhadap program sudah tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan pelaksana atau tenaga teknis dalam memberikan edukasi serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan, sehingga program dapat berjalan dengan arah yang jelas. Meskipun demikian, efektivitas program tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang ada di lapangan. Faktor pendukung meliputi ketersediaan sarana yang cukup memadai serta adanya kegiatan penyuluhan keliling yang membantu menjangkau remaja secara lebih luas dan meningkatkan penyebaran informasi terkait pentingnya kesehatan remaja. Di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat yang cukup signifikan, seperti keterbatasan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal, adanya kesibukan atau aktivitas lain dari para remaja yang menyebabkan rendahnya tingkat kehadiran, serta pengaruh lingkungan pergaulan seperti ikut-ikutan teman yang kurang berminat. Selain itu, masih terdapat anggapan di kalangan remaja bahwa Posyandu Bina Remaja hanya diperuntukkan bagi anak-anak, sehingga menurunkan minat partisipasi mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat, perbaikan fasilitas.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan

a. Pengertian

Kebijakan merupakan suatu pedoman atau arah tindakan yang dirumuskan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan maupun organisasi, kebijakan menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kebijakan tidak hanya dipahami sebagai keputusan yang bersifat statis, tetapi juga sebagai proses dinamis yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi.

Kebijakan pada dasarnya lahir sebagai respons terhadap adanya permasalahan yang dihadapi oleh suatu kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan selalu berkaitan dengan upaya pemecahan masalah yang dilakukan secara terencana dan terstruktur. Dalam perkembangan kajian kebijakan publik modern, konsep kebijakan terus mengalami pembaruan.

Menurut Howlett, Ramesh, dan Perl dalam buku *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik melalui proses yang terstruktur dan berkelanjutan (Howlett, Ramesh, & Perl, 2016: 5). Definisi ini

menegaskan bahwa kebijakan tidak hanya berupa keputusan, tetapi juga mencakup tindakan nyata yang dilakukan secara sistematis.

Selanjutnya, Cairney dalam *Understanding Public Policy: Theories and Issues* menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari interaksi berbagai aktor dalam suatu sistem politik yang kompleks, yang dipengaruhi oleh institusi, ide, dan kepentingan (Cairney, 2019: 3). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan memiliki karakteristik yang dinamis serta melibatkan banyak pihak dalam prosesnya.

Menurut Weible dan Sabatier dalam *Theories of the Policy Process* (edisi ketiga), kebijakan publik dipahami sebagai suatu proses yang mencakup berbagai tahapan, yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, dan evaluasi (Weible & Sabatier, 2018: 24).

Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan merupakan suatu siklus yang berlangsung secara berkelanjutan dan saling berkaitan. Sementara itu, Dunn dalam buku *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan yang saling berhubungan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga publik guna mencapai tujuan tertentu serta memecahkan masalah masyarakat (Dunn, 2018: 4). Definisi ini menekankan aspek analitis serta orientasi pemecahan masalah dalam kebijakan publik. Lebih lanjut, Peters dalam *American Public Policy: Promise and Performance* menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari konteks kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang memengaruhi proses perumusan hingga

implementasinya (Peters, 2019: 7). Oleh karena itu, kebijakan memiliki karakteristik yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam pelaksanaannya.

Selain sebagai instrumen pemecahan masalah, kebijakan juga mencerminkan nilai-nilai serta kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses penyusunannya, kebijakan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu pedoman tindakan yang disusun secara sistematis, memiliki tujuan yang jelas, serta digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui serangkaian proses yang terencana, melibatkan berbagai aktor, dan berlangsung secara berkelanjutan.

b. Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan

pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2016:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2018:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho (2016:120), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang

mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2018:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2018: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2018:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah

demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. David Easton sebagaimana dikutip Makbul Mansyur (2016: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

3. Efektivitas Program

a. Pengertian

Efektivitas merupakan konsep penting dalam menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan, khususnya dalam konteks organisasi dan sektor publik. Secara etimologis, efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian yang lebih luas, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga mencakup keseluruhan proses yang dilalui dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, efektivitas dapat dipahami sebagai hubungan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga suatu program dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan keluaran (*output*) yang sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

Dalam kajian modern, efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan, proses pelaksanaan, serta dampak yang dihasilkan. Menurut Van Dooren, Bouckaert, dan Halligan dalam *Performance Management in the Public Sector* menyatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat sejauh mana suatu organisasi publik mampu mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (Van Dooren, Bouckaert, & Halligan, 2015: 17).

Indikator Efektivitas menurut Van Dooren, Bouckaert, dan Halligan (2015:17):

1) Pencapaian Tujuan

Mengukur sejauh mana tujuan kebijakan atau program dapat dicapai.

2) Kesesuaian Output

Menilai kesesuaian hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

3) Dampak Kebijakan (Outcome)

Mengukur pengaruh atau manfaat program terhadap masyarakat.

Selanjutnya, Bryson dalam *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* menjelaskan bahwa efektivitas organisasi publik sangat dipengaruhi oleh keberhasilan strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan (Bryson, 2018: 45).

1) Kejelasan Tujuan Strategis

Menilai kejelasan arah dan tujuan program yang direncanakan.

2) Implementasi Strategi

Mengukur kesesuaian antara strategi yang dirumuskan dengan pelaksanaan di lapangan.

3) Pencapaian Hasil Strategis

Menilai keberhasilan strategi dalam mencapai tujuan organisasi.

4) Evaluasi dan Perbaikan

Mengukur adanya proses evaluasi untuk meningkatkan kinerja program.

Menurut Pollitt dan Bouckaert dalam *Public Management Reform: A Comparative Analysis* menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan program publik dalam menghasilkan dampak yang diharapkan (Pollitt & Bouckaert, 2017: 33).

1) Keberhasilan Program

Mengukur terlaksananya program sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2) Dampak Program

Menilai perubahan yang dihasilkan setelah program dilaksanakan.

3) Manfaat bagi Masyarakat

Mengukur sejauh mana program memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Sementara itu, Moynihan dan Pandey dalam kajiannya menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya dan koordinasi antar aktor (Moynihan & Pandey, 2018: 210).

1) Pengelolaan Sumber Daya

Menilai efektivitas penggunaan tenaga kerja, dana, dan waktu.

2) Koordinasi Organisasi

Mengukur kerja sama antar pihak yang terlibat dalam program.

3) Kinerja Organisasi

Menilai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuan program.

Lebih lanjut, Osborne dalam Public Service Logic: Creating Value for Public Service Users, Citizens and Society menyatakan bahwa efektivitas dalam sektor publik harus dilihat dari nilai publik yang dihasilkan (Osborne, 2018: 12).

1) Nilai Publik (Public Value)

Mengukur nilai atau manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

2) Kualitas Layanan

Menilai mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

3) Kepuasan Pengguna

Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan.

4) Keberlanjutan Program

Menilai kemampuan program untuk terus berjalan dalam jangka panjang.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui proses yang terencana, pemanfaatan sumber daya yang optimal, serta kemampuan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks program Posyandu Remaja, efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana program mampu mencapai tujuan, dilaksanakan sesuai rencana, serta memberikan manfaat bagi remaja sebagai sasaran program.

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah

ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Shukree et al. dalam buku Aditya Wardhana (2024:48-51) bahwa efektivitas yaitu:

1. Relevansi

Relevansi dalam konteks efektivitas organisasi merujuk pada seberapa baik tujuan dan aktivitas yang dilakukan organisasi sejalan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan komunitas. Untuk mencapai relevansi, organisasi perlu memahami dan mengidentifikasi kebutuhan ini, lalu menyesuaikan strategi dan operasionalnya agar dapat memberikan nilai yang diharapkan.

2. Efikasi

Efikasi mengacu pada sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya. Ini melibatkan penilaian tidak hanya tentang hasil yang dicapai, tetapi juga tentang bagaimana tujuan tersebut tercapai dalam konteks sumber daya dan strategi yang digunakan. Efikasi dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti kepuasan pelanggan, pertumbuhan pendapatan, dan peningkatan kinerja.

3. Efisiensi

Efisiensi dalam konteks organisasi merujuk pada penggunaan sumber daya (seperti waktu, tenaga kerja, uang, dan material) secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi bukan hanya tentang menghasilkan output yang lebih besar, tetapi juga tentang melakukan hal tersebut dengan biaya dan usaha yang lebih sedikit. Organisasi yang efisien dapat memaksimalkan hasil dengan meminimalkan pemborosan.

4. Keberlanjutan

Keberlanjutan organisasi merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan operasi dan aktivitasnya dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Organisasi yang berkelanjutan tidak hanya fokus pada profitabilitas jangka pendek, tetapi juga berusaha untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

5. Dampak

Dampak organisasi merujuk pada efek positif yang dihasilkan oleh suatu entitas terhadap pemangku kepentingan (stakeholders) dan komunitas.

sekitarnya. Dampak ini bisa berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal, serta pengembangan lingkungan yang lebih baik. Dampak positif ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan reputasi organisasi.

Menurut SP. Siagian (2016:156) kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Kriteria oleh Richard M. Steers (2016:55) dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- 1) Produktivitas
Ketika suatu perusahaan mampu menghasilkan sesuatu untuk perusahaan dalam jumlah yang besar dan mendatangkan hasil atau manfaat bagi perusahaan. Dan juga bisa menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan.
- 2) Kemampuan adaptasi kerja

Ketika setiap unsur dalam perusahaan seperti karyawan, supervisor, manajer, hingga CEO mampu melakukan adaptasi dengan baik. Di samping itu, mereka juga bisa bekerja secara flexibel.

3) Kepuasan kerja

Kepuasan dalam bekerja menandakan bahwa perusahaan sudah berhasil dan sukses dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Meski sudah berhasil, perusahaan sebaiknya terus meningkatkan kualitas atau pun kuantitas demi mempertahankan keberhasilannya

4) Kemampuan berlaba

Efektivitas organisasi juga dapat diukur dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang banyak bagi perusahaan. itu artinya, perusahaan mampu memproduksi dan menjual barang dengan baik dan benar di tengah persaingan industri yang sangat ketat.

5) Pencarian sumber daya

Perusahaan harus pandai mencari sumber daya yang berkualitas. Entah itu sumber daya alam untuk produksi atau pun sumber daya manusia untuk melakukan proses produksi dan penjualan.

Sedangkan Richard M. Steers (2017:53) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- 2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
- 3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Berdasarkan pendapat Muasaroh (dalam Normalita, 2016:10), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- 1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan para pegawai kantor mengerjakan tugas dengan baik;

- 2) Aspek rencana atau program, yaitu dimaksud dengan rencana atau program di sini adalah rencana pemberian tugas yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif;
- 3) Aspek ketentuann dan peraturan efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan. Jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif dan jika aturan ini tidak dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan juga tidak telah berlaku secara efektif;
Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai.

Arikunto dalam Monica Feronica Bormasa (2022:138) bahwa efektivitas kerja adalah:

- 1) Produktivitas
Produktivitas adalah kemampuan menghasilkan output (hasil kerja) sebanyak mungkin dengan input (sumber daya) seminimal mungkin. Dalam konteks kerja, ini berarti seberapa efisien dan efektif seseorang atau organisasi dalam menghasilkan hasil kerja.
- 2) Kemampuan Adaptasi Kerja
Kemampuan adaptasi kerja adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kerja, tuntutan pekerjaan baru, atau tantangan baru.
- 3) Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja adalah perasaan positif atau negatif seseorang terhadap pekerjaannya, yang mencerminkan seberapa jauh harapan mereka terpenuhi di tempat kerja.
- 4) Kemampuan Berlaba
Kemampuan berlaba mengacu pada kemampuan organisasi (atau individu yang menjalankan usaha) untuk menghasilkan keuntungan/laba dari kegiatan operasionalnya.

c. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

- 1) Pendekatan sasaran (*Goal Approach*) Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.
- 2) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*) Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.
- 3) Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*) Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

4. Posyandu

a. Pengertian

Sistem ini menggambarkan alur pelayanan yang sistematis sehingga setiap peserta mendapatkan pelayanan yang lengkap dan terintegrasi

- 1) Meja Pendaftaran

Meja pendaftaran berfungsi untuk mencatat data identitas peserta, seperti nama, usia, dan riwayat kesehatan. Proses ini bertujuan untuk mendokumentasikan kehadiran serta mempermudah pemantauan perkembangan peserta secara berkala, sehingga data dapat menjadi dasar evaluasi efektivitas program.

2) Meja Penimbangan dan Pengukuran

Pada meja ini dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, serta indikator kesehatan lainnya sesuai standar yang berlaku. Hasil pengukuran menjadi dasar penilaian status gizi dan pertumbuhan peserta, sekaligus sebagai acuan untuk intervensi atau tindak lanjut dari petugas kesehatan.

3) Meja Pemeriksaan Kesehatan

Meja pemeriksaan bertujuan untuk melakukan evaluasi kesehatan lebih lanjut, baik secara fisik maupun reproduksi (khusus remaja). Petugas mengevaluasi kondisi peserta, mengidentifikasi masalah kesehatan, serta memberikan rekomendasi atau rujukan ke fasilitas kesehatan apabila diperlukan.

4) Meja Pemberian Vitamin/Imunisasi dan Konsultasi

Peserta menerima pelayanan tambahan berupa pemberian vitamin, imunisasi, atau obat pencegahan penyakit sesuai kebutuhan. Meja ini juga difungsikan sebagai tempat konsultasi kesehatan, termasuk edukasi terkait gizi, kebersihan, dan perilaku hidup sehat.

5) Meja Penyuluhan dan Edukasi

Berfokus pada pemberian informasi dan edukasi kepada peserta dan keluarga, meliputi pengetahuan tentang gizi, kesehatan reproduksi remaja, kebersihan lingkungan, dan pencegahan penyakit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan, sehingga program Posyandu dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif.

Sistem 5 meja ini menunjukkan bahwa Posyandu memiliki mekanisme pelayanan yang terorganisir, terpadu, dan berkelanjutan. Selain sebagai sarana pelayanan kesehatan, Posyandu juga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar, pusat edukasi kesehatan, serta sarana pemberdayaan masyarakat. Melalui fungsi tersebut, Posyandu diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, mendorong perubahan perilaku hidup sehat, serta memperkuat kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan.

Dengan demikian, Posyandu dapat dipahami sebagai sarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang bersifat komprehensif, tidak hanya menyediakan pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga berfungsi sebagai media edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan Posyandu yang didukung oleh berbagai jenis, program kegiatan, serta sistem pelayanan yang terstruktur menjadikannya sebagai salah satu pilar penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

b. Posyandu Remaja

Posyandu Remaja merupakan salah satu inovasi dalam pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang secara khusus ditujukan untuk kelompok usia remaja. Program ini dikembangkan sebagai respons terhadap meningkatnya berbagai permasalahan kesehatan remaja, seperti masalah gizi, anemia, kesehatan reproduksi, perilaku berisiko, serta gangguan kesehatan mental dan psikososial. Kehadiran Posyandu Remaja diharapkan mampu menjadi wadah pelayanan kesehatan yang mudah diakses sekaligus sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan remaja dalam menjaga kesehatan diri secara mandiri.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018:7), Posyandu Remaja merupakan wadah pelayanan kesehatan dari, oleh, dan untuk remaja yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan remaja melalui pendekatan promotif, preventif, dan partisipatif. Berbeda dengan Posyandu pada umumnya, Posyandu Remaja menekankan keterlibatan aktif remaja sebagai pelaksana sekaligus penerima manfaat program, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek layanan, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam lingkungan sosialnya. Dalam pelaksanaannya, Posyandu Remaja memiliki berbagai kegiatan utama yang dirancang sesuai dengan kebutuhan kesehatan remaja. Kegiatan tersebut meliputi pendaftaran dan pencatatan data remaja, yang bertujuan untuk mendokumentasikan identitas serta riwayat kesehatan peserta sebagai dasar pelayanan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar, seperti

pengukuran tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh (IMT), serta pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui status kesehatan dan mendeteksi dini adanya masalah kesehatan pada remaja.

Selanjutnya, terdapat kegiatan penyuluhan dan edukasi kesehatan, yang meliputi berbagai topik seperti gizi seimbang, kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Edukasi ini menjadi salah satu komponen penting dalam membentuk pengetahuan dan sikap remaja terhadap kesehatan. Posyandu Remaja juga melaksanakan kegiatan konseling, baik secara individu maupun kelompok, yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan maupun psikososial yang dihadapi. Selain itu, terdapat pula kegiatan pengembangan keterampilan hidup (life skills), seperti pelatihan kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas remaja dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dalam aspek pelayanan kesehatan, Posyandu Remaja juga memberikan obat dan suplemen tertentu yang bersifat dasar dan preventif, sesuai dengan standar pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu yang paling umum diberikan adalah tablet tambah darah (TTD) yang mengandung zat besi, yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi anemia pada remaja, khususnya remaja putri. Pemberian TTD ini biasanya dilakukan secara rutin sebagai bagian dari program nasional

penanggulangan anemia. Selain itu, dalam kondisi tertentu, Posyandu Remaja juga dapat memberikan vitamin dan suplemen gizi, seperti vitamin A atau multivitamin, guna mendukung pertumbuhan dan daya tahan tubuh remaja. Apabila ditemukan keluhan kesehatan ringan, dapat diberikan obat-obatan dasar seperti obat penurun demam, obat sakit kepala, atau obat untuk gangguan ringan lainnya sesuai dengan kewenangan tenaga kesehatan.

Keberhasilan pelaksanaan Posyandu Remaja sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat partisipasi remaja, dukungan dari keluarga dan masyarakat, ketersediaan kader terlatih, serta peran aktif tenaga kesehatan. Selain itu, keberlangsungan program juga sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan kegiatan serta kemampuan dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan remaja yang terus berkembang.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada di rumuskan dalam penelitian tersebut. Dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian keperpustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Dalam definisi tersebut, kerangka berpikir dibuat lebih identik untuk karya tulis ilmiah

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan kerangka pemikiran yang mana di gambarkan dengan gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

